

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA PROVINSI ACEH

MUHAMMAD REZA DWIKUSMANA

NPP: 30.0056

Asal Pendaftaran Kota Langsa, Provinsi Aceh

Program Studi Kependudukan dan Catatan Sipil

Email : dwireza951@gmail.com

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): The Family Planning Village Program (Kampung KB) is one of several population programs created by the Seventh President of the Republic of Indonesia Joko Widodo on January 14 2016. This program itself has the goal of reducing the number of births in families especially in young couples or commonly called Couples of Reproductive Age (PUS) who can have the opportunity to have more than two children. Based on this, the authors took the title "IMPLEMENTATION OF THE PLANNING KAMPUNG FAMILY PROGRAM IN LANGSA BARO DISTRICT, LANGSA CITY, ACEH PROVINCE". **Purpose:** This research in writing aims to find out how the KB Village Program is implemented in Rejotangan District, what can be obstacles and supports for the KB Village Program, as well as what efforts are being made by the government to overcome obstacles in the KB Village Program implementation process. Furthermore, the author wants to see whether KB Village has a significant role and influence in controlling the rate of population growth in Langsa Baro District, Langsa City, Aceh Province. In the research on the KB Village Program, the authors analyzed using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions where the data was obtained by the author from the field in the form of observation results, interview results, and documentation results. **Method:** In this research on the Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) the authors analyzed using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions where the data were obtained by the authors from the field in the form of observations, interviews, and documentation results. The writing of this study used a qualitative design with a descriptive method and an inductive approach. Furthermore, in the analysis of the policy implementation, the writer chooses to use George Edward III's theory. **Result:** Based on the results of the research, the four implementation indicators are quite good in terms of the dimensions of communication, resources, disposition, and organizational structure. However, there is one indicator that has not been achieved, namely the facilities and employees contained in Resources. **Conclusion:** Then the writer can conclude that the implementation of the Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) in relation to controlling the rate of population growth in Langsa Baro District, Langsa City, Aceh Province has been going quite well but there are some shortcomings, especially in the existing facilities and officers. In addition, this program still needs to increase cross-sectoral cooperation and increase public awareness.

Keywords: Progame, Kampung KB, Population Control, Population Growth Rate, Birth.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) merupakan satu dari beberapa program kependudukan yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia Ketujuh Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016. Program ini sendiri memiliki tujuan yaitu untuk menekan jumlah angka kelahiran pada keluarga terutama pada pasangan muda atau biasa dikatakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang bisa memiliki peluang untuk mempunyai anak yang lebih dari dua. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil judul “IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA PROVINSI ACEH”. **Tujuan:** Penelitian ini dalam penulisan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Program Kampung KB di Kecamatan Rejotangan, apa saja yang bisa menjadi penghambat dan penunjang jalannya Program Kampung KB, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk menatasi hambatan pada proses pengimplementasian Program Kampung KB. Selanjutnya penulis ingin melihat apakah Kampung KB memiliki peran dan pengaruh yang signifikan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Provinsi Aceh. Pada penelitian tentang Program Kampung KB ini penulis analisis dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dimana data-data tersebut diperoleh penulis dari lapangan dalam bentuk hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil dokumentasi. **Metode:** Penulisan penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode deskriptif dan dengan pendekatan induktif. Selanjutnya pada analisis implementasi kebijakan tersebut penulis memilih untuk menggunakan teori milik George Edward III. **Temuan/Hasil:** Berdasarkan hasil penelitian dari empat indikator implementasi sudah cukup baik dilihat dari dimensi Komunikasi, sumberdaya, Disposisi, Struktur organisasi. Namun, terdapat satu indikator yang belum tercapai yaitu fasilitas dan pegawai yang terdapat pada Sumberdaya . **Kesimpulan:** Kemudian dapat penulis simpulkan bahwa Implementasi Program Kampung KB dalam kaitannya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh sudah berjalan cukup baik tetapi ada beberapa kekurangan terutama pada fasilitas serta petugas yang ada. Selain itu pada program ini tetap perlu adanya peningkatkan kerja samalintas sektor dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Kata Kunci : Program, Kampung KB, Pengendalian Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kelahiran.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk Indonesia secara kuantitas saat ini mengalami perkembangan dengan cepat dan menyebabkan semakin tingginya jumlah pengangguran serta kemiskinan. Pada dasarnya adanya program KB dapat bermanfaat pada perkembangan dan pembangunan masyarakat itu sendiri. Usaha untuk tetap melaksanakan program KB secara maksimal tentunya menjadi suatu hal yang mutlak bagi pemerintah sekarang ini. Program KB pada dasarnya bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang dapat berimbas pada meningkatnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat, dengan semakin sejahteranya masyarakat maka akan mempengaruhi daya beli masyarakat serta kemampuan memperbaiki taraf ekonomi serta pendidikan. Banyak sekali upaya yang dilakukan agar program KB ini dapat berjalan sebagai mana yang telah direncanakan dan mendapatkan dukungan serta partisipasi masyarakat. Maka dari itu pemerintah sebagai yang berwenang dan bertanggung jawab pada dinamika penduduk membentuk Lembaga khusus yang khusus menangani program KB yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Lembaga ini merupakan lembaga yang dibuat

pemerintah sebagai pelaksana teknis resmi yang kegiatannya terstruktur secara hierarki dan terkoordinasi mulai tingkat pusat sampai tingkat kelurahan/desa.

sensus oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 didapat bahwa penduduk Indonesia berjumlah 278,87 juta jiwa dengan kepadatan penduduknya yaitu 142 jiwa per km² dan selama periode 2011-2021, dapat diambil angka bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25 persen. Menurut jenis kelamin penduduk Indonesia terdiri dari 138,30 juta jiwa laki-laki dan 135,57 juta jiwa perempuan. Indonesia untuk saat ini sedang menikmati bonus demografi yaitu persentase penduduk produktif lebih besar dari non produktif. Persentase untuk usia produktif (15-64 tahun) terhadap total populasi tahun 2021 adalah 70,72 persen. Sedangkan untuk penduduk nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) adalah 29,28 persen.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia demi terwujudnya program KB sampai ke pelosok negeri. Presiden Joko Widodo sesuai dalam nawacita yaitu memprioritaskan pembangunan dari pinggiran, maka dibuatlah program kebijakan kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) dimana program tersebut merupakan sebuah program dari BKKBN yang bertujuan agar taraf kehidupan penduduk di tingkat kampung atau yang setara mengalami peningkatan taraf kehidupan melalui program KKBPK dan pembangunan lainnya agar terwujudnya keluarga yang berkualitas. Pembentukan serta pelaksanaan Kampung KB diamanatkan kepada BKKBN dengan memperhatikan prinsip bahwa Kampung KB merupakan implementasi dari sinergitas beberapa pihak yang terkait baik itu dari kementerian yang terkait, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta sebagai mitra pemerintah, stakeholder, serta partisipasi masyarakat itu sendiri. Kampung KB sangat penting dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk serta mengeksplorasi dan mengembangkan potensi masyarakat agar dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dengan dukungan serta partisipasi masyarakat program kampung KB ini akan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan serta esensi dari pembentukan program kampung KB itu sendiri.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kota Langsa menurut Kecamatan (Jiwa)

No	Nama Kecamatan	Penduduk (2019)	Laju 2010-2019	Persentase (2018-2019)	Kepadatan Penduduk
1.	Langsa Timur	15.809	1,14	8,94	65,925
2.	Langsa Lama	31.747	1,18	17,95	132,389
3.	Langsa Kota	42.682	1,19	24,13	152,051
4.	Langsa Baro	50.111	1,19	28,34	208,969
5.	Langsa Barat	36.462	1,19	20,62	177,989
Total		176.811	1,17	100	147,464

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa 2022

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan data yang diambil dari BPS diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengendalian pertumbuhan penduduk yang terdiri dari beberapa kecamatan yang ada di Kota Langsa bisa dikatakan berjalan dengan baik jika dilihat dari angka total laju pertumbuhan penduduk. Namun jika dilihat per kecamatan yang ada di Kota Langsa diperoleh informasi bahwa terjadi tidak merataan angka laju pertumbuhan penduduk dimana Kecamatan Rejotangan adalah salah satu yang paling besar daripada kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Langsa.

Kecamatan Langsa Baro merupakan salah satu kecamatan yang menerapkan program kampung KB di Kota Langsa. Jika dilihat dari presentase penduduk yang ada di Kota Langsa Kecamatan Langsa Baro menempati jumlah penduduk terbanyak setelah Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Barat. Berdasarkan hal itu maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa sepertinya masih sangat terpusat dan pengimplementasiannya masih belumlah merata.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks implementasi itu sendiri maupun mengenai pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Penelitian yang pertama oleh Dr. H. Romi Saputra, S.Sos., M.Si dan Lina Marlina Effendi S.Pd., M.Si (2019) dengan judul *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dalam Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur*. Penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan dua konsep *urban city* dan konsep akulturasi ini, mendapatkan hasil bahwa pengaruh kampung KB tidak terlalu dominan dalam laju pertumbuhan penduduk akan tetapi terdapat faktor lain yang berpengaruh pada laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Desi Ariani (2018) yang berjudul *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini diperoleh hasil bahwa pengimplementasian program kampung KB masih belum berjalan dengan baik sesuai target terlihat dari indikator-indikator yang diteliti yakni sumberdaya disposisi implementator dan hubungan antar organisasi.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian yang terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menganalisis pengimplementasian program kampung KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Provinsi Aceh. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan menggunakan pendapat dari Edward III dalam Agustino mengenai teori implementasi kebijakan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Kampung KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Provinsi Aceh beserta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dan untuk mengetahui upaya dalam mengatasi faktor penghambat tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sebagai suatu cara untuk menjelaskan permasalahan sebagai suatu cara untuk mengetahui dan menjelaskan permasalahan sebagai suatu cara untuk mengetahui fakta dari fenomena yang dibahas.

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder serta sumber data yang bersumber dari person, place, dan paper. Adapun informan penelitian terdiri Camat Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Provinsi Aceh, Ketua-ketua Kelompok kerja Kampung KB Kecamatan Langsa Baro, serta masyarakat dengan pengambilan data informan ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara gabungan antara terstruktur dan tidak terstruktur, observasi partisipasi pasif serta dokumentasi. Adapun analisisnya menggunakan pendapat dari Edward III dalam Agustino mengenai teori implementasi. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menyimpulkan berkaitan implementasi program Kampung KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Provinsi Aceh dengan metode deskriptif kualitatif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni menggunakan pendapat dari Edward III dalam Agustino mengenai teori implementasi kebijakan yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, serta struktur organisasi. Adapun pembahasannya dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Komunikasi

3.1.1 Transmisi

Berdasarkan pengamatan penulis selama magang di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa kemarin, penerusan pemahaman terkait pentingnya pengendalian penduduk dengan mengoptimalkan peran KB dengan program Kampung KB ini sudah dilakukan dengan baik. terbukti dengan adanya sosialisasi yang diselenggarakan oleh petugas lapangan Balai Penyuluh KB serta petugas Kelompok Kerja Kampung KB di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.

Dari apa yang penulis amati semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kampung KB ini aktif untuk mendorong masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif. Tujuan dorongan dari semua pihak ini agar implementasi Program Kampung KB dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan mulai dari Dinas PPPAKB Kota Langsa yang melaksanakan Program Kampung KB dengan kerjasama lintas sektor Kecamatan yang tanggap dengan Program Kampung KB terlihat dengan terbanyak Kampung-kampung KB diseluruh Kecamatan yang ada di Kota Langsa.

Petugas lapangan serta kelompok kerja yang secara langsung sebagai pelaksana di wilayah juga bersemangat dalam setiap keterlibatan dalam kegiatan, dan terlihat dari masyarakatnya yang juga sudah mulai menyadari bahwa ber KB itu penting terutama untuk pasangan usia subur (PUS) yang sangat berperan penting dalam menekan angka kelahiran. Walaupun jika dinilai secara inisiatif masyarakat ini masih kurang tetapi secara partisipasi masyarakat ini tidak

memberikan penolakan yang berarti walaupun dalam pelaksanaannya harus melalui sosialisasi dan konseling terlebih dahulu, tetapi masyarakat sudah mulai menyadari betapa pentingnya menjadi peserta KB aktif terutama bagi pasangan usia subur (PUS).

Tabel 2
Perbandingan PUS dan Peserta KB dari Tahun 2020-2022

Tahun	PUS	Peserta KB
2020	7.898	4.315
2021	10.515	5.774
2022	11.333	5.908

Sumber DPPPKB Kota Langsa

3.1.2 Kejelasan

Berdasarkan hasil pengamatan oleh penulis, menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam proses pelaksanaan Program Kampung KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sudah disampaikan secara jelas yang dibuktikan dengan terlaksananya tujuan dari dibentuknya Program Kampung KB di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan juga dengan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar desa yang ada pada pelaksanaan Kampung KB terbukti dari wawancara kepada masyarakat yang menatakan bahwa program KB sangat penting adanya.

3.1.3 Konsistensi

Pelaksanaan implementasi akan berlangsung efektif apabila intruksi-intruksi pelaksanaannya harus dilakukan secara konsisten dan terpadu. Berdasarkan pengamatan penulis di tempat magang, menunjukkan bahwa Kecamatan Langsa Baro sudah sangat menekankan pelaksanaan terkait program Kampung KB salah satunya dengan sosialisasi mengenai pentingnya untuk ikut serta dalam program KB. Selain itu, dari pihak bidan desa juga telah memaksimalkan program Kampung KB dengan cara ikut mengajak warga masyarakat disekitar desa pelaksana program Kampung KB untuk meningkatkan pemahaman mengenai edukasi kontrasepsi secara terus menerus.

3.2 Sumberdaya

3.2.1 Pegawai

Pelaksanaan program pemerintah dalam hal ini Kampung KB didukung beberapa pihak baik dari pusat sampai ke wilayah-wilayah agar Kampung KB dapat terlaksana sesuai seperti yang diharapkan. Dalam pernyataan-pernyataan yang ada dalam wawancara menyatakan bahwa pelaksana program dari Kampung kb banyak pihak yang terlibat, mulai dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, Pemerintah. Daerah yang kemudian mendelegasikan tugas tersebut kepada Dinas terkait di Kota Langsa yang kemudian berkerjasama dengan Kecamatan Langsa Baro dan Desa Alue Dua Bakaran Batee untuk membentuk Kampung KB, serta partisipasi masyarakat Kampung KB tersebut.

Selain itu analisis tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam pasal 16 sampai 23 yaitu adanya penyuluhan pembinaan serta pelayanan pengaturan kelahiran kepada masyarakat yang dilaksanakan secara kerjasama baik melalui Bidan Desa ataupun Dinas Kesehatan.

Analisis juga sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yaitu dengan

dilaksanakannya konseling dan pelayanan kontrasepsi melalui Bidan Desa ataupun Puskesmas terdekat sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan Program KB.

3.2.2 Informasi

Informasi tentang pemahaman dengan peraturan kedisiplinan maupun protocol Kesehatan serta tata cara pelaksanaannya sudah cukup jelas. Dilihat dari pengamatan berdasarkan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Langsa Baro diperoleh informasi bahwa rata-rata banyak masyarakat yang memahami informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan KB. Maka dari itu bisa diketahui bahwa pelaksanaan program Kampung KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk cukup bagus dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat cukup jelas.

Tabel 3
Peserta KB Berdasarkan Alat Tahun 2020-2022

Desa/Kel	Peserta KB							
	IUD	Pil	STK	IMPL	MOP	MOW	KNDM	JML
2020	478	556	437	145	0	200	68	4.315
2021	340	1.121	801	133	7	270	215	5.774
2022	335	1.100	872	149	5	253	208	5.908

Sumber: Dinas DPPP3A Kota Langsa

3.2.3 Fasilitas

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, selain fasilitas protocol Kesehatan yang harus dipersiapkan oleh setiap OPD di Kota Langsa, fasilitas teknologi informasi mutlak diperlukan dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing petugas pada masa pandemic seperti ini. Selain itu fasilitas tersebut juga berimbas pada efektifitas bagaimana informasi mengenai program KB dapat tersampaikan secara cepat dan efisien.

Fasilitas yang Digunakan yaitu beberapa sumber-sumber yang dapat mendukung dalam pelaksanaan Program Kampung KB yang disimpulkan dari pernyataan informan yaitu anggaran yang berasal dari pusat, kabupaten serta dari desa yang kemudian digunakan untuk operasional kegiatan oleh pengurus Kampung KB. Selain itu terjalannya kerjasama lintas sektor juga dapat menunjang pelaksanaan kampung kb. Serta pasrtisipasi dari masyarakat sebagai objek dalam program Kampung KB ini juga sangat dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang menghambat baik dari anggaran, kerjasama lintas sektor ataupun kendala pasrtisipasi masyarakat.

3.3 Disposisi

3.3.1 Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kampung KB di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dapat dikatakan bahwa tidak terjadi perubahan dengan susunan kepagawaian selama pandemic Covid-19, semua petugas tetap melakukan pokok dan fungsinya masing-masing walaupun terjadi beberapa hambatan yang ada. Umumnya petugas yang ada menyampaikan bahwa pemerintah, dinas terkait, petugas

lapangan memberikan informasi dan kegiatan yang berhubungan dengan KB, Kesehatan reproduksi, stunting, dan lain-lain yang dibutuhkan masyarakat melalui banyak media seperti melalui sosialisasi, radio FM, KIE, Leaflet, Media Cetak, sosial Media, yang sasarannya langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu susunan kepegawaian dalam pelaksanaan Program Kampung KB bisa dinilai serius karena banyak kegiatan yang dilaksanakan secara maksimal yang berpengaruh pada tercapainya target atau tujuan program.

3.3.2 Insentif

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pemberian insentif ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai, sedangkan kinerja yang baik itu dipengaruhi juga terhadap bagaimana respon serta kedisiplinan yang baik. Jadi untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja petugas diperlukan pemberian insentif yang sesuai untuk dijadikan motivasinya.

3.4 Struktur Birokrasi

3.4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan peneliti, tidak ada perubahan SOP dalam pelaksanaan penerapan Program Kampung KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Namun, pada penerapannya ada sedikit penyesuaian mengingat untuk saat ini segala hal dilakukan dengan penerapan protocol Kesehatan yang sangat ketat.

3.4.2 Pembagian Kerja

Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan oleh penulis, diperoleh informasi bahwa pembagian tugas pada pelaksanaan Program Kampung KB di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa pada masa pandemic tetap sesuai dengan SOP yang ada namun ada sedikit perubahan dimana ada beberapa pekerjaan yang pada penerapannya lebih diutamakan untuk menggunakan teknologi. Penerapan menggunakan teknologi tersebut berupa pemaksimalan penggunaan media sosial, aplikasi untuk meeting, whatsapp, dan lain sebagainya.

3.5 Faktor penghambat dalam implementasi program kampung keluarga berencana di kecamatan langsa baro kota langsa provinsi aceh

Berdasarkan hasil pengamatan berikut, faktor-faktor penghambat pengimplementasian program kampung KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Provinsi Aceh sebagai berikut.

1. Perubahan Pelaksanaan Program yang Dilakukan Secara Terbatas Pasca Pandemi Covid-19

Pandemi menyebabkan perubahan semua tatanan misalnya pelaksanaan program mulai pemasangan alat KB, sosialisasi ke masyarakat, serta pendampingan ke masyarakat yang biadanya dapat dilakukan secara face to face langsung untuk saat ini harus memaksimalkan dengan cara daring. Dan walaupun dilaksanakan secara langsung seperti pemasangan alat KB harus dilaksanakan dengan protocol yang lebih ketat sesuai dengan anjuran pemerintah. akibat adanya pandemic Covid-19 ini telah mengakibatkan berubahnya tatanan atau system dalam pelayanan Kampung KB di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Provinsi Aceh. Contoh dari perubahan tersebut adalah pada pelaksanaan beberapa program seperti sosialisasi dan pendampingan yang lebih digencarkan melalui pemaksimalan media sosial yang bisa saja lebih efektif namun terkadang kurang efektif karena pada dasarnya apabila dilaksanakan secara luring akan lebih interaktif antara petugas dan masyarakat.

2. Kurangnya Legalitas mengenai Kampung KB di Kota Langsa.

Dari sisi legalitas, di Kota Langsa memang belum ada yang mengatur secara spesifik bagaimana pelaksanaan kampung KB yang ada. Pelaksanaan kampung KB untuk tingkat daerah .

3. Pengawasan Belum Optimal

pasca pandemic seperti ini semua pelaksanaan kegiatan lebih dianjurkan bahkan diwajibkan untuk menggunakan media yang serba digital untuk pertukaran informasi, maka hal tersebut memunculkan pemikiran untuk melakukan kecurangan demi kepentingan diri sendiri.

4. Sarana dan Prasarana Belum Optimal

3.6 Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi program kampung keluarga berencana di kecamatan langsa baro kota langsa provinsi aceh

Kelembagaan Keluarga berencana di daerah merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 52 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38n Tahun 2007. Dengan ditebitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dikatakan bahwa Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) merupakan salah satu urusan wajib diantara 28 urusan wajib (pasal 7). Hal ini berarti bahwa KB dan KS merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat sehingga kabupaten/kota wajib menyelenggarakan program Kependudukan dan keluarga Berencana.

Implementasi Kampung KB dapat juga didukung dengan upaya-upaya dari pemerintah yang dapat membuat kegiatan Kampung KB dapat berjalan dengan baik, seperti:

1. Dukungan yang sangat berperan adalah dukungan dari sisi anggaran, karena tanpa anggaran maka suatu kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar.
2. Dukungan dari sisi sumber daya manusianya, sumber daya manusia baik penanggung jawab, perancang, perencana, petugas, bahkan sampai dengan masyarakat sangat berperan terhadap pelaksanaan dari kampung kb.
3. Dukungan dari sisi kegiatan, dukungan ini merupakan dukungan tambahan yang muncul karena adanya dukungan dari sumber daya manusia sehingga memunculkan kegiatan-kegiatan yang dirasa diperlukan dalam pelaksanaan program kampung kb.
4. Dukungan kerjasama baik petugas dilapangan, maupun kerjasama lintas sektor yang memiliki tujuan visi dan misi. Dukungan ini memberikan peran penting dan dampak yang lebih besar dikarenakan cakupan yang lebih besar dan luas bisa didapatkan melalui Kerjasama lintas sector.
5. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dilaksanakan melalui bakti sosial pelayanan KB bagi keluarga pra dan Keluarga Sejahtera.
6. Pelayanan komunikasi, informasi dan edikasi (KIE), dilaksanakan melalui pameran pembangunan, pawai pembangunan, operasional mobil unit pelayanan kb dan kegiatan aneka berita Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera (KBKS).
7. Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dilaksanakan melalui fasilitasi pembinaan KB aktif agar menjadi KB lestari.
8. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling dilaksanakan melalui, pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dan promosi penekanan kelahiran.
9. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh KB, kader dan tenaga kesehatan dilaksanakan melalui pengelola program DPPKBPPPA.

10. Penguatan jejaring dan kemitraan, dilaksanakan melalui TNI manunggal KB/Kes, Bhayangkara KB, Kesatuan gerak PKK-KB-Kes.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kampung KB merupakan salah upaya dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang terlihat oleh pandangan pemerintah. Kampung KB, kedepannya akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Keberhasilan program KKBPK dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek pengendalian kuantitas penduduk, kedua, aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusur melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam PP disebutkan delapan fungsi keluarga meliputi (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi social budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan. Kampung KB juga merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan Nawacita ke 3, 5, dan 8. Nawacita ketiga yaitu yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta Nawacita kedelapan yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Kampung KB menjadi program inovatif yang strategis dalam mengejawantahkan program KKBPK secara paripurna di lapangan. Pasalnya, Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat. Kampung KB merupakan Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan berkaitan mengenai implementasi program kampung KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Provinsi Aceh sudah bisa dikatakan cukup baik karena dapat dilihat dalam dimensi komunikasi, disposisi dan sstruktur birokrasi, namun masih ada dimensi yang belum tercapai yaitu pada subdimensi pegawai dan fasilitas pada dimensi sumberdaya. Adapun hambatan dalam penelitian ini yaitu terletak pada perubahan pelaksanaan program yang dilakukan secara terbatas pasca pandemi, kurangnya legalitas mengenai kampung KB di Kota Langsa, Pengawasan belum optimal dan Sarana dan prasarana belum optimal. Adapun upaya untuk mendukung implementasi program kampung KB agar berjalan baik yaitu dengan dukungan dari sisi manapun oleh pemerintah, , penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin yang dilaksanakan melalui bhakti sosial pelayanan KB bagi keluarga pra dan keluarga sejahtera, pelayanan komunikasi informasi dan edikasi, pembinaan

mengenai Keluarga Berencana, pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling, peningkatan kapasitas tenaga penyuluh KB, kader dan tenaga Kesehatan, serta penguatan jejaring dan kemitraan dilaksanakan melalui TNI manunggal KB/Kes Bhayangkara KB, Kesatuan gerak PKK-KB-Kes.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat dari Edward III dalam Agustino mengenai teori implementasi kebijakan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai implementasi program kampung KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Provinsi Aceh.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Provinsi Aceh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Fathoni. 2011. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik : Proses Analisis dan Partisipasi. Bogor : Ghalia Indonesia .
- Hartanto, H. 2004. Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta : BPFE.
- Moloeng, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Neuman, Laurence. 2006. Dasar Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta : Pearson Indonesia
- Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik : Formula, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : ElexMedia Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sulistyawati, Ari. 2011. Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta Selatan : Salemba Medika.
- Syafiie, Kencana. 2011. Manajemen Pemerintahan. Jawa Barat : Reka Cipta.
- Syafri, Wirman. 2016. Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja. Sumedang : Zalqaprint Jatinangor.

- Umar, Husein. 2008. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Depok : Raja Grafindo.
- Wibowo. 2014. Manajemen Kinerja. Edisi Keempat. Jakarta : Rajawali Pers.
- Widodo. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang : MNC Publishing
- Winarno, Budi. 2011. Kebijakan Publik. Yogyakarta : Caps.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penulisan Karya Ilmiah Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Ariani, Desi. 2018. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Medan : <http://repositori.usu.ac.id/>
- Saputra, Romi & L.M Effendi. 2019. Pembentukan Kampung Keluarga Berencana dalam Pengendalian Angka Kelahiran di Kabupaten Karawang. Jakarta : <http://eprints.ipdn.ac.id/>

